



Jurnal Tata Sejuta Vol. 4, No. 1, Maret 2018

## Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM

<http://ejournalstiamataram.ac.id>

P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670

### ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA GILI TRAWANGAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Mira Janu Yustisi <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) MATARAM

---

#### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 20 Februari  
2018

Disetujui: 16 Maret 2018

Dipublikasikan: 30 Maret  
2018

---

Kata Kunci:

Pariwisata,  
Stakeholder,  
Komunikasi,  
Kerjasama,  
Koordinasi,  
Kolaborasi

#### Abstrak

Gili Trawangan merupakan daerah objek wisata di Kabupaten Lombok Utara yang paling banyak dikunjungi oleh semua wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ini didukung oleh banyaknya usaha wisata yang sudah ada di Gili Trawangan yang mana bisa dipastikan bahwa banyak pula stakeholder yang terlibat didalamnya. Setiap stakeholder memiliki hubungan antara satu dengan lainnya karena dalam pengelolaan pariwisata membutuhkan dukungan antar stakeholders agar tercipta pengelolaan pariwisata yang lebih baik. Analisis stakeholder membantu untuk melihat tentang hubungan yang terjadi antar stakeholder dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kecamatan Pemenang, Pemerintah Desa Gili Indah, Koperasi Karya Bahari, Asosiasi pengusaha Gili Trawangan (Hotel, Bungalow, Dive Shop, Restoran), Gili Ecotrust, Karang Taruna, Yayasan Pemerhati Penyu, Kelompok Buruh, dan Koperasi Janur Indah. Hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari empat aspek, pertama dilihat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan konflik diantara para stakeholder. Kedua, Kerjasama tidak dilakukan antar ketiga sektor (pemerintah, swasta dan masyarakat), selain itu juga kerjasama yang dilakukan hanya dalam bentuk kegiatan semata yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara tertulis, Ketiga, dilihat dari aspek koordinasi yang terjadi hanya ketika akan dilakukannya kegiatan atau dijalkannya sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dan hanya ditentukan oleh para ahli saja (pemerintah). Keempat, kolaborasi yang dilakukan hanya terkait dengan kegiatan atau event-event pariwisata dan promosi pariwisata, kolaborasi yang dilakukan ini juga hanya melibatkan dua sektor yakni pemerintah dan swasta.

---

## ANALYSIS OF STAKEHOLDER FOREST MANAGEMENT OF TRAVEL GILI OBJECT IN NORTH LOMBOK REGENCY

---

**Keywords:**

Tourism,  
Stakeholder,  
Communication,  
Cooperation,  
Coordination,  
Collaboration

**Abstract**

*Gili Trawangan is an area of tourism in North Lombok regency which is most visited by tourists and travelers, which are foreign tourists and domestic tourists. The high number of tourist visits is supported by the number of tourism businesses that already exist in Gili Trawangan which can be ascertained that many stakeholders are involved in it. Every stakeholder has a relationship between each other. That Relationship is a must because in the management of tourism needs support among stakeholders in order to create a better management of tourism. The stakeholders analysis to help see about the relationships that occur between stakeholders in the management of Gili Trawangan tourist attraction. The method used in this research is a qualitative method. Data obtained from primary data and secondary data. The result of the research shows that stakeholders involved in the management of Gili Trawangan tourism object are Department of Culture and Tourism of North Lombok Regency, Winner District Government, Gili Indah Village Government, Cooperative of Gili Trawangan (Hotel, Bungalow, Dive Shop, Restaurant) , Gili EcoTrust, Karang Taruna, Turtle Observer Foundation, Labor Group, and Janur Indah Cooperative. The relationship between stakeholders in the management of Gili Trawangan tourist object has not been going well, it can be seen base on four aspects. 1). The Communication among departments that does not run well which resulting in conflict among the stakeholders. 2). The Cooperation is not carried out between the three sectors (government, private and public), but only in the form of activities that do not have the power of law and written rules. 3). The Coordination aspect that occurs only when the activity will be carried out or the execution of a policy from the local government of North Lombok Regency and only determined by experts only (government). 4). The Collaboration is only related to tourism events, activity and promotion, so this Collaboration also involves only two sectors, government and private.*

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Alamat korespondensi:  
myra\_chapiel@yahoo.com

### PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak memiliki objek wisata untuk dikelola salah satunya adalah Gili Trawangan yang berada di Kecamatan Pemenang. Pengelolaan dari sebuah objek wisata secara umum melibatkan banyak *stakeholders* seperti pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Menurut Mayers (2005) *Stakeholder* adalah mereka yang memiliki hak atau kepentingan dalam suatu sistem, sedangkan menurut Bryson (2004) *stakeholders* juga sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh

pencapaian tujuan organisasi, sehingga *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata menentukan tingkat keberhasilan pada sektor pariwisata.

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki banyak potensi wisata seperti wisata bahari, wisata alam pegunungan, wisata religi, budaya, dan kerajinan. Kabupaten Lombok Utara baru berdiri selama delapan tahun, akan tetapi Kabupaten Lombok Utara mampu menghasilkan 50% Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisatanya (Kepala Dinas Pariwisata KLU : 20 Agustus 2016). Dengan tingginya jumlah PAD yang diterima oleh Kabupaten Lombok Utara ini maka pemerintah harus lebih bisa membangun dan menggali potensi wisata dan melibatkan semua *stakeholders* yang ada sehingga pendapatan yang diterima juga semakin besar. Pengelolaan wisata di Kabupaten Lombok Utara tidak hanya dilakukan oleh pelaku jasa wisata saja, akan tetapi perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai *stakeholders* untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Dari tahun ke tahun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Utara terus meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisatawan yakni 71,524 orang, tahun 2010 berjumlah 228,287 orang, tahun 2011 berjumlah 337,646 orang, tahun 2012 berjumlah 426,969 orang, kemudian pada tahun 2013 kunjungan wisatawan berjumlah 486,870 orang (Laporan tahunan dan evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara). Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ini didukung oleh banyaknya usaha wisata yang sudah ada di Gili Trawangan yang berjumlah 505 (Arsip Dinas Pariwisata : 2013), seperti Hotel, restaurant, *cafe*, rumah makan, *diving*, salon, *travel agent*, *money changer* dan masih banyak lagi usaha wisata lainnya.

Adapun pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan ini diantaranya pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dari pihak pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah kecamatan pemenang dan pemerintah desa Gili Indah, kemudian dari sektor swasta terdapat para pengusaha hotel. Stakeholders lain yang ada di objek wisata Gili Trawangan antara lain Komunitas cinta lingkungan, gili ecotrust, satgas gili, front masyarakat peduli peduli lingkungan, security island, asosiasi pengusaha Gili Trawangan, asosiasi nelayan, PKK, Karang Taruna, yayasan Pemerhati Penyu, Kelompok Buruh, Koperasi Karya Bahari dan Koperasi Janur Indah.

Setiap stakeholder memiliki hubungan antara satu dengan lainnya karena dalam pengelolaan pariwisata membutuhkan dukungan antar stakeholders agar tercipta pengelolaan pariwisata yang lebih baik. Pada konsep hubungan antar stakeholder

ditunjukkan untuk melihat bagaimana hubungan yang terjalin di antara stakeholder yang terlibat melalui tinjauan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari informan yang dapat memberikan informasi tentang hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan berasal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Pemenang dan Pemerintah desa Gili Indah) dan seluruh stakeholder yang terlibat di objek wisata Gili Trawangan. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang didapatkan melalui proses wawancara dengan narasumber selanjutnya diolah kedalam transkrip wawancara. Selain itu juga peneliti melakukan telaah pada berbagai studi literature yang berhubungan dengan topik pembahasan tentang analisis stakeholder dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan. Setelah data terkumpul kemudian yang dilakukan selanjutnya yakni ada reduksi data dengan memilih hal-hal pokok yang relevan dan tidak relevan dengan penelitian. Data yang telah dipilih kemudian disajikan kedalam bentuk-bentuk yang dapat mempermudah peneliti dalam memahami data, misalnya dibentuk kedalam sebuah uraian atau bagan yang dapat menjelaskan mengenai hubungan antar stakeholder. Setelah itu peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan pisau analisis atau kerangka yang didasarkan pada landasan teori. Setelah proses ini selesai, maka dengan adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten maka akan ditemukan jawaban mengenai hubungan antar stakeholder pada pengelolaan objek wisata Gili Trawangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Stakeholder Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Gili Trawangan Di Kabupaten Lombok Utara**

Identifikasi stakeholder dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang stakeholder terkait dengan pengelolaan objek wisata Gili Trawangan di Kabupaten

Lombok Utara. Adanya identifikasi stakeholder dalam pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan alat untuk melihat pola hubungan antara masing-masing stakeholder berkaitan dengan peran yang dimainkannya. Penulis kemudian mengklasifikasi menjadi beberapa kelompok yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan banyak stakeholder yang sebelumnya sudah ada akan tetapi tidak bisa menjalankan perannya lagi dikarenakan dua hal yakni karena adanya kasus pungli (pungli uang kebersihan, keamanan dan pendidikan) dan tidak adanya pengurus yang menjalankan. Stakeholders yang dibubarkan atau fakum karena kasus pungli ini antara lain Komunitas cinta lingkungan, satgas Gili, front masyarakat peduli lingkungan, dan security island. Stakeholders yang tidak berjalan lagi karena tidak ada pengurus yang menjalankan lagi yakni asosiasi nelayan dan PKK.

Dari seluruh stakeholder yang sebelumnya sudah diidentifikasi oleh peneliti dengan jumlah 19 aktor, akan tetapi sekarang hanya tersisa menjadi 13 aktor saja dalam pengelolaan obyek wisata Gili Trawangan. Tabel dibawah ini akan mengelompokkan aktor-aktor kedalam tiga kelompok sesuai dengan orientasi kegiatannya yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara.

**Tabel**

Klasifikasi Stakeholder Terlibat

No	Stakeholder Pemerintah	Stakeholder Swasta	Stakeholder Masyarakat
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara	Asosiasi pengusaha Gili Trawangan (Hotel, Bungalow, Dive Shop, Restoran)	Gili Ecotrust
2	Pemerintah Kecamatan Pemenang		Karang Taruna
3	Pemerintah Desa Gili Indah		Yayasan Pemerhati Penyu
4	Koperasi Karya Bahari		Kelompok Buruh
5			Koperasi Janur Indah

Sumber Data : Diolah oleh peneliti, 2017

### **Stakeholder Pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara)**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara merupakan stakeholder kunci dari pengelolaan objek wisata Gili Trawangan karena sangat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Selain itu juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki pengaruh atau kekuasaan dan kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan.

Peran pemerintah yang masih melekat sampai sekarang adalah sebagai pembuat regulasi yang menghasilkan produk hukum sebagai dasar dalam menjabatani kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan peran yang melekat dengan sektor publik dan tidak bisa dipindahtanggankan kepada sektor yang lainnya. Peran inilah yang menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki pengaruh yang besar dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat regulasi dan berusaha menjadikan stakeholder yang lainnya paham aturan sehingga dapat bekerjasama dalam segala aspek kegiatan pariwisata. Selain membuat regulasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mengawal semua aturan yang sudah ada, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati sehingga dapat terlaksana.

### **Stakeholder Pemerintah (Pemerintah Kecamatan Pemenang)**

Pemerintah Kecamatan Pemenang merupakan salah satu aktor yang berperan dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan, akan tetapi pemerintah kecamatan baru berpartisipasi dalam proses pengelolaan objek wisata ini semenjak awal tahun 2017. Hal ini terjadi karena ada pelimpahan wewenang dari Bupati Kabupaten Lombok Utara bahwa setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat disetiap kecamatan sehingga camat harus dilibatkan. Terkait dengan objek wisata Gili Trawangan, kebijakan yang ikut dirumuskan oleh pemerintah kecamatan pemenang yakni penertiban roypantai.

Kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki pemerintah kecamatan pemenang semenjak awal tahun 2017 ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki kepentingan terkait pengelolaan objek wisata Gili Trawangan, kepentingan tersebut yakni demi meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Gili Trawangan dan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.

### **Stakeholder Pemerintah (Pemerintah Desa Gili Indah)**

Pemerintah Desa Gili Indah yang berada di wilayah Kecamatan Pemenang dalam hal ini menjadi desa tempat beradanya objek wisata Gili Trawangan selama ini tidak memiliki kekuasaan dalam perencanaan pengelolaan objek wisata Gili Trawangan. Pengaruh yang dimiliki pemerintahan desa hanya sebatas kegiatan desa saja seperti event-event, akan tetapi untuk perencanaan terkait pengelolaan Gili Trawangan Pemerintah desa Gili Indah tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh.

Lemahnya pengaruh yang dimiliki oleh pemerintah desa Gili Indah ini tidak menutup kepentingan yang mereka ingin capai terkait tujuan dari pengelolaan objek wisata Gili Trawangan, keinginan tersebut adalah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gili Trawangan.

#### **Stakeholder Pemerintah (Koperasi Karya Bahari)**

Koperasi Karya Bahari merupakan koperasi yang khusus bergerak di jasa angkutan laut ke Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Sekarang koperasi memiliki 52 anggota dan jumlah boat anggotanya sebanyak 53 boat dan 4 fastboat. Koperasi ini tidak memiliki kekuasaan dalam perencanaan pengelolaan Gili trawangan, koperasi ini hanya akan dihubungi atau dipanggil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara jika ada yang dikonsultasikan terkait masalah angkutan. Terkait masalah kepentingan pengelolaan Gili Trawangan, koperasi karya bahari yang hanya mengurus masalah angkutan laut ini berharap pengelolaan Trawangan mampu meningkatkan wisatawan yang datang kesana sehingga bisa mensejahterakan masyarakat dan anggota koperasi.

#### **Stakeholder Swasta (Asosiasi pengusaha Gili Trawangan)**

Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) merupakan organisasi yang menaungi seluruh pengusaha yang ada di Gili Trawangan, mulai dari pengusaha hotel, bungalow, dive shop dan restoran. Asosiasi ini didirikan agar lebih memudahkan para pengusaha menjalin komunikasi diantara mereka. Asosiasi ini menjadi perwakilan dari seluruh pengusaha Gili Trawangan jika ada undangan dari pemerintah, bahkan terkait informasi juga akan terlebih dahulu diterima oleh Asosiasi ini kemudian diinformasikan kepada seluruh pengusaha yang ada di Gili Trawangan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh Asosiasi ini hanya disaat pemerintah membutuhkan bantuan terkait implementasi suatu kebijakan untuk Gili Trawangan, asosiasi ini membantu pemerintah mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilakukan kepada seluruh pengusaha di Gili Trawangan. Kemudian terkait masalah kepentingan, asosiasi ini tidak memiliki kepentingan apapun selain sebagai wadah seluruh pengusaha Gili Trawangan dalam menjalin komunikasi di antara mereka.

### **Stakeholder Masyarakat (Gili Ecotrust)**

Gili Ecotrust adalah organisasi non pemerintah yang dibuat pada tahun 2000 untuk melindungi terumbu karang dari penangkapan ikan yang merusak ketiga Gili (Trawangan, Meno dan Air). Gili ecotrust membuat regulasi untuk nelayan terkait dengan penangkapan ikan. Pada tahun 2010 Gili Ecotrust ini memperluas kegiatannya yakni mengurus masalah yang didarat mulai dari pemilihan sampah dan mendaur ulang sampah tersebut, melakukan penelitian ulang dan penelitian dengan universitas, memberikan klinik perawatan hewan, menyiapkan pariwisata yang berkelanjutan dengan energi hijau dan masih banyak lagi lainnya.

Akan tetapi Gili Ecotrust ini tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam perencanaan terkait pengelolaan Trawangan untuk kedepannya. Hal ini dibuktikan dari tidak pernah dipanggil atau diundangnya Gili Ecotrust oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengelolaan Gili Trawangan.

### **Stakeholder Masyarakat (Karang Taruna)**

Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang ada di Gili Trawangan yang mulai terbentuk sekitar tahun 1992. Kegiatan yang dilakukan yakni untuk sosial kemasyarakatan, masjid, gotong royong (kebersihan). Karang taruna tidak memiliki kekuasaan dalam perencanaan pengelolaan Gili Trawangan, hal ini dilihat dari tidak pernah diundangnya karang taruna dalam rapat perencanaan pengelolaan Gili Trawangan. Selain hal itu, karang taruna juga tidak menunjukkan kepentingan khusus yang mereka inginkan karena melihat kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka laksanakan.

### **Stakeholder Masyarakat (Yayasan Pemerhati Penyu)**

Yayasan pemerhati penyu adalah yayasan yang bergerak pada bidang penangkaran penyu. Yayasan pemerhati penyu ini berdiri pada tahun 2008. Pembiayaan untuk penangkaran penyu ini didapatkan dari donasi dari para pengunjung yang berkeinginan melepaskan penyu ke pantai. Donasi yang diterima digunakan untuk membeli telur penyu, untuk mesin dan membayar listrik setiap bulannya.

Dari pertama kali berdiri yayasan pemerhati penyu ini tidak memiliki kekuasaan dalam merencanakan pengelolaan Gili Trawangan, akan tetapi yayasan ini memiliki kepentingan dalam pengelolaan Gili Trawangan ini. Kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu tidak boleh ada bangunan 50 meter dari pesisir pantai dan akan dilakukannya pelebaran jalan, sedangkan bangunan penangkaran penyu ini terdapat dipesisir pantai Gili Trawangan (Utaranya Pelabuhan). Yayasan ini meminta kepada

pemerintah agar tidak meratakan bangunan yang sudah didirikan dari tahun 2008 tersebut.

#### **Stakeholder Masyarakat (Kelompok Buruh)**

Kelompok buruh merupakan kelompok masyarakat Gili Trawangan maupun masyarakat Lombok Utara yang membantu penumpang maupun para pengusaha dalam mengangkut barang dan berada di Gili Trawangan. Kelompok buruh ini terbagi menjadi dua yaitu kelompok buruh material dan kelompok buruh penumpang.

Kelompok buruh ini tidak memiliki kekuasaan dalam perencanaan suatu kegiatan, kelompok buruh ini juga tidak pernah diundang oleh pemerintah terkait dengan masalah pengelolaan Gili Trawangan. Kelompok buruh ini diundang hanya saat kegiatan-kegiatan kebersihan seperti gotong royong yang diadakan setiap hari Jumat setiap minggunya. Selain tidak memiliki kekuasaan, kelompok buruh ini juga tidak memiliki kepentingan, hal ini disimpulkan sendiri oleh peneliti karena mereka tidak pernah mengurus masalah kebijakan atau kegiatan yang akan dilakukan, mereka hanya fokus kepada perannya membantu penumpang beserta para pengusaha Gili Trawangan.

#### **Stakeholder Masyarakat (Koperasi Janur Indah)**

Koperasi Janur Indah merupakan koperasi yang bergerak dibidang jasa transportasi angkutan darat di Gili Trawangan yang terbentuk pada tanggal 29 Desember 2005 dan sudah memiliki badan hukum. Selain bergerak dibidang jasa transportasi angkutan darat, koperasi ini juga mengembangkan usahanya seperti UKM Mart, bengkel dan konter jasa tiket untuk pemesanan cidomo. Koperasi Janur Indah ini beranggotakan 32 orang dan setiap anggota harus memiliki cidomo. Koperasi Janur Indah tidak memiliki kekuasaan dalam perencanaan pengelolaan Gili Trawangan, koperasi ini hanya pernah diundang oleh Kepala Dusun dalam artian hanya untuk membahas keamanan dan sampah. Kemudian terkait kepentingan koperasi Janur Indah, kepentingan yang diinginkan oleh koperasi ini adalah legalitas mereka jelas dalam pengelolaan trawangan.

### **Hubungan Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan Di Kabupaten Lombok Utara**

Setiap stakeholder memiliki hubungan antara satu dengan lainnya karena dalam pengelolaan pariwisata membutuhkan dukungan antar stakeholders agar tercipta pengelolaan pariwisata yang lebih baik. Pada konsep hubungan antar stakeholder

ditunjukkan untuk melihat bagaimana hubungan yang terjalin di antara stakeholder yang terlibat melalui tinjauan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

Dalam melihat hubungan yang terjadi antar stakeholder dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan, maka dilihat dari empat aspek yakni bagaimana stakeholder menjalin komunikasi satu dengan lainnya, bagaimana kerjasama yang terjadi antar stakeholder, bagaimana koordinasi antar stakeholder dan bagaimana kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder.

### **Komunikasi Antar Aktor**

Hubungan pariwisata mencakup beberapa tantangan salah satunya ada kebutuhan yang jelas untuk membangun saluran komunikasi (Aas : 2005). Komunikasi adalah elemen penting dari aktivitas keterlibatan dan pra syarat untuk keterlibatan (Koschmann, Kuhn & Prarrer 2012) dan komunikasi dapat dilihat sebagai indikator proaktif dalam mengembangkan hubungan (Plaza-Ubeda et al 2010). Dengan demikian, komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan atau relasi.

Komunikasi pada pengelolaan objek wisata Gili Trawangan menjadi aspek yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan diantara para stakeholder sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetapi hal ini sangat berbeda dari keadaan yang terjadi dilapangan, komunikasi tersebut tidak dilakukan atau dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk berhubungan satu dengan lainnya.

Proses komunikasi yang berjalan dengan baik dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan hanya terjadi antara pemerintah dengan swasta sedangkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan swasta tidak berjalan baik. Proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ini akan mengakibatkan kesalahan informasi diantara para stakeholder dalam menjalani hubungan untuk pengelolaan objek wisata Gili Trawangan. Peneliti menemukan salah satu kesalahan yang diakibatkan dari tidak berjalannya proses komunikasi dengan baik, yakni adanya masalah pungutan liar (pungli) yang terjadi di Gili Trawangan.

### **Kerjasama Antar Aktor**

Pada konsep hubungan antar stakeholder ditunjukkan untuk melihat bagaimana hubungan yang terjalin di antara stakeholder yang terlibat melalui tinjauan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, salah satu bentuk interaksinya adalah kerjasama. Menciptakan kerjasama bukanlah sesuatu yang mudah atau datang dengan sendirinya. Kerjasama adalah upaya yang sengaja dilakukan oleh beberapa aktor untuk melakukan

penyesuaian dan perubahan agar bisa memperoleh hasil yang lebih optimal. Jadi, yang penting dalam kerjasama adalah perlunya tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta harus tetap dibuka untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak bisa berjalan lebih optimal. Pola pikir yang mendasarkan bahwa setiap aktor dari kita memiliki modal dan kemampuan yang spesifik yang apabila dikelola bersama melalui *co-production*, maka akan lebih efektif dan efisien dibandingkan jika dikerjakan secara terpisah (PLOD UGM : 2004).

Dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan, kerjasama yang diharapkan ini hanya terjadi diantara beberapa stakeholder dan tidak terjadi antara seluruh stakeholder yang ada di sana. Seperti misalnya pemerintah yang bekerjasama dengan para pengusaha yang ada di Gili Trawangan, kerjasama antar pengusaha, kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat, dan kerjasama sektor swasta dengan organisasi masyarakat.

Kerjasama yang terjadi dalam pengelolaan objek wisata ini tidak terjadi diantara ketiga stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu juga kerjasama yang dilakukan hanya dalam bentuk kegiatan semata yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara tertulis. Peneliti melihat bahwa keberhasilan untuk peningkatan jumlah wisatawan di Gili Trawangan karena stakeholder yang berjalan sendiri-sendiri tanpa melakukan kerjasama secara bersamaan.

#### **Koordinasi Antar Aktor**

Pengelolaan sebuah objek wisata tentunya memerlukan adanya interaksi atau hubungan antar pemangku kepentingan itu sendiri yakni koordinasi antar aktor. Pariwisata merupakan sektor terfragmentasi, membutuhkan koordinasi yang bertujuan untuk menjamin koherensi persepsi dan penyampaian (Wang & Fesenmaier 2007). Koordinasi dalam pengelolaan objek wisata sangat perlu untuk diperhatikan, dimana melihat banyaknya stakeholder yang terlibat dan terdiri dari multi sektor sehingga dengan koordinasi semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain. Tujuan lain dilakukannya koordinasi antar aktor ini juga untuk mencegah konflik dan kontradiksi, persaingan yang tidak sehat, pemborosan, kekosongan ruang dan waktu dan terjadinya perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan.

Koordinasi yang terjadi antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Gili Trawangan tidak berjalan dengan baik. Koordinasi yang terjadi hanya ketika akan

dilakukannya kegiatan atau dijalankannya sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Salah satu contoh kebijakan yang dijalankan yaitu penertiban roy pantai. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara hanya melakukan koordinasi dengan para pengusaha yang ada di Gili Trawangan tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya.

### **Kolaborasi Antar Aktor**

Pada tataran akademis, kolaborasi antar aktor menurut Gray et al (2003) dapat dipahami sebagai kegiatan mengelola dan tata kelola pemerintahan sehingga kolaborasi merupakan hubungan kemitraan antara publik dengan swasta atau privat atau dengan lembaga swadaya (non profit) berbasis jejaring, negosiasi antara aktor, pemerintahan konsorsium, perjanjian, serta diatur oleh hukum yang luwes. Pada studi kebijakan publik menurut Prefontaine et al. (2000), kolaborasi antar aktor dilakukan secara sukarela dan resiprokal (timbang balik) antara dua atau lebih badan layanan publik yang berbeda seperti antara administrasi publik dengan lembaga swasta termasuk pula organisasi swadaya masyarakat dalam menjalankan suatu kebijakan publik.

Sama dengan ketiga aspek hubungan sebelumnya, dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan bentuk kolaborasi yang dilakukan hanya terkait dengan kegiatan atau event-event pariwisata. Kolaborasi yang dilakukan ini juga hanya melibatkan dua sektor yakni pemerintah dan swasta. Event yang pernah dilakukan seperti gili festival. Akan tetapi bentuk kolaborasi yang dilakukan hanya seperti menyiapkan tempat dan menyiapkan makan siang.

Selain melakukan sebuah event, bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah melakukan promosi pariwisata. Akan tetapi promosi pariwisata yang disediakan atau program dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara kurang dirasakan oleh para pengusaha yang ada di Gili Trawangan. Promosi pariwisata lebih sering dilakukan oleh kementerian dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Komponen Proses kolaborasi menurut Gash (2007) yakni komponen dialog, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama dan outcomes tidak dilalui atau dilakukan oleh kedua sektor stakeholder Gili Trawangan ini. Dialog yang merupakan inti pada proses membangun kepercayaan, saling menghormati, membangun pemahaman bersama dan membangun komitmen pada proses kolaborasi tidak dilakukan oleh keduanya. Pemerintah sudah melakukan atau memberikan undangan kepada para pengusaha untuk bisa hadir membicarakan pengelolaan trawangan selanjutnya akan tetapi tidak dihadiri oleh para pengusaha. Hal ini terjadi karena para pengusaha merasa pendapat mereka tidak didengarkan oleh pemerintah

daerah Kabupaten Lombok Utara. Para pengusaha hanya diberikan undangan kemudian mereka mengutarakan pendapat kepada pemerintah akan tetapi semua saran tersebut tidak didengarkan oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan tidak sejalannya pemerintah dan sektor swasta dalam melakukan kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan.

Agar memudahkan dalam melihat arah hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan, berikut rangkuman dari ketiga sektor yang dibedakan menjadi empat aspek yakni komunikasi antara aktor, kerjasama antar aktor, koordinasi antar aktor dan kolaborasi antar aktor.

**Tabel**

Arah komunikasi antar aktor dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan

Stakeholder	Pemerintah	Swasta	Masyarakat
Pemerintah			
Swasta			
Masyarakat			

Sumber data: diolah oleh peneliti, 2017

**Tabel**

Arah kerjasama antar aktor dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan

Stakeholder	Pemerintah	Swasta	Masyarakat
Pemerintah			
Swasta			
Masyarakat			

Sumber data: diolah oleh peneliti, 2017

**Tabel**

Arah koordinasi antar aktor dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan

Stakeholder	Pemerintah	Swasta	Masyarakat
Pemerintah			
Swasta			
Masyarakat			

Sumber data: diolah oleh peneliti, 2017

**Tabel**

Arah kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan

Stakeholder	Pemerintah	Swasta	Masyarakat
Pemerintah			
Swasta			
Masyarakat			

Sumber data: diolah oleh peneliti, 2017

Ket :	
	= Melakukan
	= Tidak Melakukan

Melihat keempat aspek hubungan ini yang tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan dan juga melihat konflik yang terjadi didalamnya, peneliti melihat bahwa berkembangnya objek wisata Gili Trawangan dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang karena stakeholder menjalankan perannya masing-masing. Ketika seluruh stakeholder menjalankan perannya masing-masing dan menjalin hubungan yang harmonis maka outcomes yang sudah ditentukan dalam RIPPARDA Kabupaten Lombok Utara akan tercapai melebihi dari angka yang sudah tercipta sekarang ini.

## **PENUTUP**

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kecamatan Pemenang, Pemerintah Desa Gili Indah, Koperasi Karya Bahari, Asosiasi pengusaha Gili Trawangan, Gili Ecotrust, Karang Taruna, Yayasan Pemerhati Penyus, Kelompok Buruh, dan Koperasi Janur Indah.

Komunikasi antar stakeholder dalam pengelolaan Gili Trawangan tidak dilakukan/dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder untuk berhubungan satu dengan lainnya. Proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ini mengakibatkan kesalahan informasi diantara para stakeholder dalam menjalani hubungan untuk pengelolaan objek wisata Gili Trawangan.

Dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan, kerjasama yang diharapkan ini hanya terjadi diantara beberapa stakeholder dan tidak terjadi antara seluruh stakeholder yang ada di sana. Kerjasama yang terjadi dalam pengelolaan objek wisata ini tidak terjadi diantara ketiga stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat).

Koordinasi yang terjadi antar stakeholder yang terlibat tidak berjalan dengan baik. Koordinasi yang terjadi hanya ketika akan dilakukannya kegiatan atau dijalankannya sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan bentuk kolaborasi yang dilakukan hanya terkait dengan kegiatan atau event-event pariwisata dan promosi pariwisata. Kolaborasi yang dilakukan ini juga hanya melibatkan dua sektor yakni pemerintah dan swasta. Komponen Proses komunikasi yakni dialog, membangun

kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama dan outcomes tidak dilalui atau dilakukan oleh kedua sektor stakeholder ini.

Saran yang diberikan adalah : 1) Perlu di tingkatkannya komunikasi di sektor swasta dan masyarakat sehingga arus informasi bisa berjalan dengan baik. 2) Kerjasama diantara ketiga sektor harus dilakukan dengan matang agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas sehingga menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan. 3) Koordinasi yang dilakukan harus bersifat hierarki dan tidak hanya *top down* saja akan tetapi juga harus *bottom up*. 4) Kolaborasi yang baik antar aktor sehingga *outcomes* yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal. 5) Dibentuknya Pokdarwis di Gili Trawangan sehingga stakeholder yang ada di Gili Trawangan tidak berjalan dengan sendirinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aas, Christina., Ladkin, Adele., and Fletcher, John., 2005, *Stakeholder Collaboration and Heritage Management*, Annals of Tourism Research Journal, Vol 32 No 1, pp 28-48.
- Ansell, Chris. dan Gash, Alinson., 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, JPART 18:543-571.
- Bryson, J.M., 2004, *What To do When Stakeholders Matter*, Vol 6 Issue 1: 21-53.
- Herujito, Y.M., 2001, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Grasindo.
- Kusumedi, Priyo., dan HB, Achmad Rizal., 2010, *Analisis Stakeholders dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan*. Journal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol 7, No 3m : 179-193.
- Mayers, James., 2005, *Stakeholder power analysis*. International institute for environment and development.
- Mishra, D., 2012, *Impact of Physical Ambiance on Communication, Collaboration and Coordination in Agile Software Development: An Empirical Evaluation*, Information and Software Technology Vol. 54(10).
- Moleong, L.J., 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Ndraha, T., 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- PLOD UGM, 2004, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, Yogyakarta: Jogja Global Media.
- Reed, M.S., Graves, Anil., Dandy, Norman., Posthumus, Helena., Hubacek, Klaus., and Morris, Joe., 2009, *Who's in and why? A typology of stakeholder analysis*

*methods for natural resource management.* Journal of Environmental Management 90 (2009) 1922-1949.

Salam, Md.A., and Noguchi, T., 2006, *Evaluating Capacity Development for Participatory Forest Management in Bangladesh Sal Forests Based on 4Rs Stakeholder Analysis*, Forest Policy and Economics 8 785–796. doi:10.1016/j.forpol.2004.12.004.

Sugiyono., 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suyanto, bagong., dan Sutinah, e.d., 2004, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.

Varvasovszky, Z., and Brugha, R., 2000, *How to do (or not to do), A Stakeholder analysis*, 15(3), 338-345.

Wanna, John., 2008, *Collaborative Government: Meanings, dimensions, driver and outcomes*, Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia, ANU ePress, Australia, pp. 3-12.

Winarno, Budi., 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Jakarta: PT. Buku Seru.